



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS KOTA RADEN HULU DAN PALAMPITAN HULU

Moh. Fajar Noorrahman¹, Nida Urahmah²

¹Dosen Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

²Dosen Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail : Moh.Fajar.Rachman@gmail.com¹, nidaurahmah697@gmail.com²

Article History:

Received: 27-04-2024

Revised: 17-05-2024

Accepted: 30-05-2024

Keywords:

Partisipasi Masyarakat,
Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Abstract: Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, yang rendah berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2. Pentingnya penelitian ini didasari oleh kurangnya sosialisasi dan evaluasi dari BAPENDA serta rendahnya keaktifan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat, faktor penghambat, dan upaya peningkatan partisipasi dalam pembayaran PBB-P2. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari 13 orang: 3 dari BAPENDA, 5 dari Desa Kota Raden Hulu, dan 5 dari Desa Palampitan Hulu. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta diuji kredibilitasnya dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di kedua desa kurang baik. Faktor penghambat di Desa Kota Raden Hulu adalah masalah ekonomi, sementara di Desa Palampitan Hulu adalah rendahnya kesadaran dan keaktifan masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi meliputi sosialisasi rutin dan pengingat oleh aparat desa. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan sosialisasi oleh BAPENDA dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini untuk kepentingan daerah.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Telah umum diketahui bahwa berkaitan dengan wilayah kekuasaan tertentu, adanya sejumlah rakyat dan adanya pemerintah yang sebagai suatu kesatuan politik merdeka berdaulat, predikat tertua yang diperoleh suatu negara ialah sebagai "negara politik". Dengan predikat yang demikian itu, pemerintah suatu negara menyelenggarakan empat fungsi pokok yang sifatnya tradisional dan klasik, yaitu; memelihara ketertiban dan keamanan, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi diplomatik, dan fungsi perpajakan (Siagian, 2018:134-135).

Menurut Djajadiningrat (dalam Resmi, 2019:1) Pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Penelitian sebelumnya

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis pemungutan pajak bumi dan bangunan masih belum baik dikarenakan di dua desa tersebut mengalami beberapa permasalahan yaitu:

1. Berdasarkan hasil observasi Kurangnya sosialisasi yang diberikan ke setiap desa dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ke masyarakat sehingga masyarakat masih tidak semuanya mengetahui tentang PBB-P2.
2. Keaktifan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di desa masih kurang yang dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang ikutserta dalam hal keaktifan membayar pajak PBB-P2 di setiap tahunnya. Bisa dilihat di Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada (Tabel 1.1.)
3. Evaluasi yang masih kurang dilakukan oleh BAPENDA karena tidak ada yang turun langsung kelapangan untuk mengawasi mengenai pembayaran PBB-P2 dan juga dari BAPENDA hanya melihat data laporan penerimaan PBB-P2 yang dilaporkan oleh pihak desa masing-masing.

Tabel 1.1
Data Jumlah Objek Pajak Di 2 Desa Studi Kasus Pada Tahun 2021

No.	DESA	WAJIB PAJAK	WAJIB PAJAK (BELUM BAYAR)	WAJIB PAJAK (SUDAH BAYAR)
1.	Kota Raden Hulu	280	181	99
2.	Palampitan Hulu	576	437	139

(sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021)

Hal demikian juga dikuatkan dengan penelitian terdahulu oleh Miladiah (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Warjaen kurang optimal. Faktor yang menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pendidikan dan keterlibatan pemerintah desa. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat kurang baik karena tingkat komunikasi, sikap dan tanggung jawab petugas pajak belum optimal. Hal demikian terlihat masih ada permasalahan terkait dengan pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Kota Raden Hulu Dan Palampitan Hulu”

LANDASAN TEORI

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Churchman and Lawrence (dalam Meiliana, 2011:21) partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat tersebut terlibat dalam

menyangkut berbagai hal ataupun pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan tindakan untuk mencapai suatu perubahan.

Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-62), partisipasi masyarakat dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

Data dan sumber data. Menurut Sugiyono (2014:308-309) Data berupa Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer adalah data pokok yang diperoleh atau digali secara langsung melalui wawancara yang dilakukan penulis dilapangan sedangkan Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal dan lain sebagainya, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian, selain itu data juga didapatkan dari literatur-literatur di media internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Menurut Gunawan (2015,142) Sumber Data berupa Dokumen, Arsip dan informan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dengan Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu Informan merupakan orang yang lebih mengetahui tentang permasalahan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengambilan Keputusan

a. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan di sini adalah suatu rencana kegiatan wacana yang ingin dilakukan untuk perbaikan kedepannya demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan yang dibuat oleh BAPENDA sudah baik meskipun tidak melakukan sosialisasi secara langsung kemasyarakat, karena pemberian sosialisasi ini bekerja

sama dengan bagian kantor kecamatan dan dibantu oleh Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat.

b. Sosialisasi Hasil Keputusan Kepada Masyarakat

Maksud disini adalah hasil keputusan rapat yang diadakan oleh BAPENDA kepada masyarakat yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Desa mengenai pembayaran PBB-P2 agar dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di dapat disimpulkan bahwa untuk sosialisasi hasil keputusan kepada masyarakat pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu ini BAPENDA memutuskan menyesuaikan keputusan dengan mengacu pada PERDA terkait keluhan masyarakat yang mempunyai sarang burung wallet yaitu dengan tarif 10%, 7%, 5%, 2,5% tergantung dari hasil pendapatan sarang burung wallet yang diperoleh masyarakat tersebut.

2. Pelaksanaan

a. Keaktifan Masyarakat dalam mencari informasi

Maksud dari keaktifan masyarakat dalam mencari informasi yaitu masyarakat selaku wajib pajak PBB-P2 di tuntut harus selalu aktif dalam mencari informasi tentang pembayaran PBB-P2 disetiap tahunnya dalam melakukan pembayaran PBB-P2 agar target dari BAPENDA selaku pengelola PBB-P2 terealisasi sepenuhnya dan dapat membantu pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu keaktifan masyarakat dalam mencari informasi terkait membayaran PBB-P2 masih kurang karena selalu dingatkan oleh aparat desa mengenai pembayaran PBB-P2 disetiap tahunnya bukan atas kesadaran diri sendiri dalam mencari informasi karena biasanya ada petugas pajak yang diwakili oleh desa dalam menagih pajak jadi masyarakat ini langsung bayar tanpa mencari tahu apapun informasi terkait pembayaran PBB-P2 ini.

b. Sumbangan Pemikiran

Maksudnya masyarakat selaku wajib pajak dituntut untuk memberikan ide atau gagasan dan mengajak seluruh masyarakat agar mau ikut berpartisipasi setiap tahunnya untuk membayar PBB-P2 dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Pada Desa Kota Raden Hulu sumbangan pemikirannya berupa ingin aparat desanya lebih cepat membagi dan menagih SPPT-PBB itu di awal jangan diakhir tahun. Kemudian, rata-rata Masyarakat Pada Desa Palampitan Hulu ingin aparat desanya terutama RT harus lebih aktif dalam menagih PBB-P2 kerumah-rumah atau ditunjuk 1 orang dalam menagih PBB-P2 tersebut agar masyarakat disetiap tahunnya tidak mengalami tunggakan/ keterlambatan membayar PBB-P2 setiap tahunnya dan diharapkan juga saat penagihan kerumah-rumah untuk membawa SPPT-PBB yang asli bukan yang sementara karena masyarakat sewaktu-waktu kalau misal ingin mengurus sesuatu membutuhkan SPPT-PBB yang asli.

c. Tanggung Jawab

Maksud dari tanggung jawab disini adalah tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku pengelola pajak PBB-P2 harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah

berhasil atau ikut berpartisipasi dalam melakukan pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Untuk tanggung jawab dari Masyarakat Pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu sudah bertanggung jawab karena mereka merasa sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2 setiap tahunnya.

3. Pengambilan Manfaat

a. Tujuan Program

Tujuan program disini adalah untuk mengetahui apakah semua masyarakat sudah mengetahui tujuan dari program di wajibkannya membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu Masyarakatnya sudah mengetahui tentang tujuan dari program diwajibkannya membayar PBB-P2 ini untuk membangun pembangunan daerah dan keuntungannya kembali kemasyarakat juga dan merasakan hasil dari pembayaran pajak itu seperti perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur dan lain-lainya

b. Target Program

Target program disini adalah tentang keberhasilan program yang telah ditargetkan/pencapaian sasaran apakah sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, jika target yang telah ditetapkan dari dinas tercapai maka target program yang di maksudkan dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa target dari Desa Kota Raden Hulu sudah tercapai dan mengalami kenaikan sekitar 80% setiap tahunnya sedangkan di Desa Palampitan Hulu setiap tahunnya target tercapai secara keseluruhan dari dinas terkait dan mengalami kenaikan setiap tahunnya karena masyarakat ada yang membuat PBB-P2 baru atau melakukan perubahan otomatis presentase setiap tahunnya selalu naik.

4. Evaluasi

a. Pengawasan dari Dinas

Pengawasan adalah salah satu kegiatan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu untuk pengawasan langsung dari BAPENDA sama-sama tidak ada kemasyarakat karena bagaian dari BAPENDA yang meminta kepada Kepala Desanya untuk melakukan pengawasan langsung kemasyarakat secara rutin setiap tahunnya

b. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi disini bertujuan untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan dan melihat sejauh mana pelaksanaan masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Kota Raden dan Desa Palampitan Hulu belum ada evaluasi secara langsung dari BAPENDA kemasyarakat karena BAPENDA hanya meminta bantuan ke aparat desa untuk mengingatkan kemasyarakat bahwa ma-

syarakat di desa ini untuk membayar pajak ini sekian-sekian belum terpenuhi jadi dari bagian aparat desa yang langsung mengingatkan ke-masyarakat.

c. Ketercapaian Program

Maksudnya yaitu suatu proses yang dilakukan untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dari dinas ketika program sedang dilaksanakan, dan juga melakukan pemantauan (*monitoring*) data pendataan PBB-P2 untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan program sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu untuk Ketercapaian program dari BAPENDA tidak ada karena masyarakat di Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu sebagian besar masyarakatnya memilih membayar langsung ke Kantor Desa yang kemudian di setorkan Ke BAPENDA karena bagi masyarakat itu mudah.

5. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 Pada Desa Kota Raden Hulu Dan Palampitan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Kota Raden Hulu dan Desa Palampitan Hulu faktor yang menghambat adalah masalah kesadaratan, keaktifan, pendapatan ekonomi masyarakat yang menengah kebawah dan juga pelaporan yang tidak dilakukan masyarakat mengenai perubahan data objek pajak ke dinas atau kepala desa.

6. Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 Pada Desa Kota Raden Hulu Dan Palampitan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BAPENDA, Kepala Desa Kota Raden Hulu dan Kepala Desa Palampitan Hulu yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan dikumpulkannya para kepala desa beserta aparatnya di kantor kecamatan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 dan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar PBB-P2 setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran (PBB-P2) pada Desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu dapat dikatakan kurang baik. *Pertama*, Pelaksanaan dapat dikatakan kurang baik karena keaktifan masyarakat dalam mencari informasi terkait pembayaran PBB-P2 masih kurang setiap tahunnya karena selalu diingatkan oleh aparat desa mengenai pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya, dibuktikan masih hanya sebagian dari masyarakat yang aktif sendiri mencari informasi tentang membayar PBB-P2. *Kedua*, Evaluasi dapat dikatakan kurang baik karena tidak ada pengawasan dan juga evaluasi pelaksanaan secara langsung kemasyarakat oleh BAPENDA setiap tahunnya karena Kepala Desanya untuk melakukan pengawasan secara langsung kemasyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat pada desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu adalah masalah kesadaratan, keaktifan, ekonomi masyarakat yang menengah kebawah dan juga pelaporan yang tidak dilakukan masyarakat mengenai perubahan data objek pajak ke dinas atau kepala desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Tim Redaksi SENTRI. Jurnal Riset Ilmiah yang telah membuka kesempatan sehingga artikel ini dapat diterbitkan. Penulis

juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai serta. Kedua orang tua dan rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim. 2021. Data Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak diterbitkan.
- [2] Daulay, Y., & Aisyah, S. (2023). Challenges and Remedial Strategies in Land Tax Collection in Medan Belawan: Qualitative Analysis with NVivo and Matrices of Framework. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 513-524. Tersedia : <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2131>
- [3] Dwiningrum, S. I. A. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar
- [4] Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [5] Meiliana, dkk.. 2011. *Pola Prakarsa Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan*. Samarinda, Kalimantan Timur: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III.
- [6] Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus* edisi 11, buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- [7] Siagian P. S. 2018. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksa
- [8] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA